

TINJAUAN TEORITIS

A. Pengertian Bagi hasil

Sistem bagi hasil merupakan sistem dimana dilakukannya perjanjian atau ikatan usaha bersama dalam melakukan kegiatan usaha. Bagi hasil menurut terminologi asing (bahasa Inggris) dikenal dengan *profit sharing*. Profit dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba. Secara definisi *profit sharing* diartikan "distribusi beberapa bagian dari laba pada pegawai dari suatu Perusahaan".¹

Qiradh secara bahasa berasal dari kata *qardh* yang artinya potongan sebab yang mempunyai harta memotong hartanya buat sipekerja agar dia bisa bertindak dengan harta itu dan sepotongan keuntungan. Dari jata yang sama juga *miqradh* yaitu alat yang memotong (gunting) juga dinamakan *mudharabah* (bagi hasil) karna memiliki arti berjalan diatas muka bumi yang bisa dinamakan berpergian.² Allah berfirman, (QS. Al- Baqarah) (2) : 198



Artinya :”Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu.”³

¹ Muhammad, *Teknik Perhitungan Bagi hasil di Bank Syariah*, (Yogyakarta, UII Press, 2001), h. 105

² Abdul Aziz Muhammas Azzam, *Fiqih Muamalat*, (Jakarta, Sinar Grafika Offset, 2010), h. 245

³ Departemen Agama RI, *Al-quran dan Terjemahan*, (Bandung : CV Penerbit Diponegoro, 2013), h. 31

Dalam ayat diatas dapat kita tarik kesimpulan bahwa melakukan perbuatan yang baik dari pelaksanaan dan urusan ekonomi, tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunian dan bertebaranlah di muka bumi Allah dalam menyelesaikan urusan duniawi.

Secara sederhana dapat dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan bagi hasil adalah perjanjian pengelolaan tanah, dengan upah sebagian dari hasil yang diperoleh dari pengelola tanah.⁴ Sistem bagi hasil merupakan sistem di mana dilakukannya perjanjian atau ikatan bersama di dalam melakukan kegiatan usaha. Di dalam usaha tersebut diperjanjikan adanya pembagian hasil atas keuntungan yang akan di dapat antara kedua belah pihak atau lebih. Besarnya penentuan porsi bagi hasil antara kedua belah pihak ditentukan sesuai kesepakatan bersama, dan harus terjadi dengan adanya kerelaan (*An-Tarodhin*) di masing-masing pihak tanpa adanya unsur paksaan. Mudharabah termasuk juga perjanjian antara pemilik modal (uang dan barang) dengan pengusaha dimana pemilik modal bersedia membiayai sepenuhnya suatu usaha /proyek dan pengusaha setuju untuk mengelola proyek tersebut dengan bagi hasil sesuai dengan perjanjian.⁵

Sedangkan yang disebut dengan hasil sesuai dengan ketentuan pasal 1 Undang- undang tersebut adalah:”hasil usaha petanian yang diselenggarakan

⁴ Chairuman Pasaribu Suhrawardi K. Lubis, (Jakarta, Sinar Grafika, 2004),h.61

⁵ Warkum Sumitro, *Asas-Asas Perbankan Islam Dan Lembaga-Lembaga Terkait*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2004), h.. 32

oleh penggarap dalam perjanjian bagi hasil, setelah dikurangi biaya – biaya selama proses berlangsung.⁶

Didalam usaha tersebut dibuat perjanjian adanya pembagian hasil atas keuntungan yang akan didapat diantara kedua belah pihak atau lebih. Bagi hasil di perbankan syariah merupakan ciri khusus yang ditawarkan kepada masyarakat dan di dalam aturan syariah yang berkaitan dengan pembagian hasil usaha harus ditentukan terlebih dahulu pada terjadinya kontrak (akad).⁷

Pembagian hasil ini kepada pihak penggarap menurut kebiasaan yang berkembang di tengah – tengah masyarakat bervariasi, ada yang setengah, sepertiga atau lebih rendah dari itu, bahkan terkadang cenderung sangat merugikan kepada pihak penggarap selalu mempunyai ketergantungan kepada pemilik.

Mekanisme perhitungan bagi hasil yang biasa diterapkan adalah sebagai berikut:⁸

1. *Profit sharing*

Profit sharing menurut *etimologi* adalah bagi keuntungan. Dalam kasus ekonomi diartikan sebagai pembagian laba. Profit secara istilah perbedaan yang timbul ketika total pendapatan (*Total revenue*) suatu perusahaan lebih besar dari biaya total (*Total cost*).

Dalam ajaran Islam, konsep *profit sharing* sering disebut juga dengan bagi hasil. Konsep ini paling mudah dijumpai dalam praktek

⁶ Chsiruman Pasaribu Suhrawardi K. Lubis, *Loc.cit*

⁷ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta : UPP AMP YKPN, 2002) , h.

⁸ *Ibid*, h. 102

masyarakat islam pada masa Rasullullah dan sahabat hingga masyarakat muslim saat ini.⁹

Dalam istilah lain profit sharing adalah perhitungan bagi hasil didasarkan kepada hasil bersih dari total pendapatan setelah dikurangi dengan biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut.

2. *Revenue sharing*

Revenue sharing berasal dari bahasa inggris yang terdiri dari dua kata yaitu revenue yang berarti hasil, penghasilan pendapatan. *Sharing* bentuk kata kerja dari *share* yang berarti bagi atau bagian. *Revenue sharing* perhitungan bagi hasil berdasarkan kepada *revenue* (pendapatan) dari pengelola.

Aplikasi dari kedua dasar bagi hasil ini mempunyai kelebihan dan kekurangan masing – masing. Pada profit sharing semua pihak yang terlibat dalam akad akan mendapatkan bagi hasil sesuai dengan laba yang diperoleh atau bahkan tidak mendapatkan laba apabila pengelola dana mengalami kerugian yang manual.

Ciri utama pola bagi hasil adalah bahwa keuntungan dan kerugian ditanggung bersama. Beberapa prinsip dasar bagi hasil yang dikemukakan oleh Usmani adalah sebagai berikut :¹⁰

- a. Bagi hasil tidak berarti meminjam uang tetapi merupakan partisipasi dalam usaha.

⁹ M. B. Hendrie Anto, *Pengantar Ekonomi Mikro Islami*, (Yogyakarta, Ekonisia, 2003), Cet. Ke- 1, h. 242

¹⁰ Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2002), h. 11

- b. Investor atau pemilik dana harus ikut menanggung resiko kerugian usaha sebatas proporsi pembiayaan.
- c. Para mitra usaha bebas menentukan dengan persetujuan bersama rasio keuntungan masing – masing pihak.
- d. Kerugian yang ditanggung oleh masing – masing pihak harus sama dengan proporsi investasi mereka.

B. Landasan Hukum bagi hasil

Akad *mudharabah* dibenarkan oleh islam, karena bertujuan untuk saling membantu antara pemilik modal dan orang yang memutarakan uang. Bagi hasil (*Qiradh*) adalah *ijma'* dan qiyas terhadap *musaqah* (bagi hasil ladang), dengan kesamaan bahwa setiap pekerjaan yang menghasilkan sesuatu ada bayarannya walaupun tidak diketahui berapa besarnya, dan karena *musaqah* dan *qiradh* keduanya diperbolehkan karena keperluan dimana orang yang mempunyai pohon kurma tidak bisa mengurus tanaman dan tidak ada waktu dan orang yang bisa bekerja dengan baik terkadang tidak ada modalnya.¹¹

Secara umum kegiatan *mudharabah* lebih mencerminkan anjuran untuk melaksanakan usaha. Hal ini ulama fiqih, sepakat bahwa *mudharabah* disyaratkan dalam islam berdasarkan pada Al-quran, Sunah, *Ijma'* dan Qiyas.

¹¹ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Op,Cit*, h,246

1. QS Al Jumu'ah (62) : 10



Artinya: “Apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung”.¹²

Dari ayat diatas dapat kita tarik kesimpulan bahwa setelah selesai melakukan salat Jumat boleh bertebaran di muka bumi melaksanakan urusan duniawi, berusaha mencari rezeki yang halal, sesudah menunaikan yang bermanfaat untuk akhirat. Hendaklah mengingat Allah sebanyak-banyaknya di dalam mengerjakan usahanya dengan menghindarkan diri dari kecurangan, penyelewengan dan lain-lainnya, karena Allah Maha Mengetahui segala sesuatu, yang tersembunyi apalagi yang nampak nyata.

2. As-sunah

Nabi SAWsendiri juga membolehkan akad ini sebagaimana hadits yang berbunyi:

عن صالح بن سهيب عن ابيه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثلاث فيهن البركة البيع الى اجل والمقارضة واخلاط البر بالشعير

Artinya: “Dari Shohih bin Shuhaib r.a. bahwa Rasulullah SAW baersabda “Tiga hal yang didalamnya terdapat keberkatan: jual beli secara tangguh, muqaradhah (mudharabah) dan mencampur gandum dengan tupung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual.(HR. Ibnu Majah).¹³”

¹² Departemen Agama RI, *Al-quran dan Terjemahan*, h. 554

¹³ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, Penerjemah Tharirim Suparta, (Bandung: CV Di Ponegoro, 1988) h. 452

Dari hadist di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam melaksanakan akad *mudharabah* harus jujur dan tidak dibolehkannya melakukan penghianatan dalam jual beli dan berbisnis.

Legalitas hukum *mudharabah* dapat pula dianalogikan dengan *Al-Musaqat* (perkongsian antara pemilik dan pengelola) karena kebutuhan manusia terhadapnya dimana sebagian orang memiliki dana dan tidak mempunyai keahlian untuk mengelola, sedangkan pihak yang lain memiliki keahlian tetapi tidak mempunyai modal untuk menopang usahanya.

3. Ijma Ulama

Ibnu Al- Munzir berkata, “ para ulama sepakat secara umum, akad (transaksi) *mudharabah* diperbolehkan “. ¹⁴

Akad *mudharabah* adalah akad *jaa'iz* (toleran), bukan akad *lazim* (mengikat). Untuk itu, kapan saja salah satu pihak mengiginkan akad dihentikan maka akad tersebut dapat dihentikan (*faskh*). Pada saat itu, *mudharib* harus menyerahkan modal dalam bentuk mata uang (*tunai*). ¹⁵

Ijma dalam *mudharabah* adanya riwayat yang menyatakan bahwa jamaah dari sahabat menggunakan harta anak yatim untuk *mudharabah*. Perbuatan tersebut tidak ditentang oleh sahabat lainnya.

4. Qiyas

Mudharabah *diquyaskan* kepada *al-musyaqah* (menyuruh seseorang untuk mengelola). Selain diantara manusia ada yang miskin dan ada yang kaya. Disatu sisi, banyak orang kaya tidak dapat mengusahakan hartanya. Disisilain, tidak sedikit orang miskin yang mau bekerja, tetapi

¹⁴ *Ibid*, h. 23

¹⁵ Abdullah bin Abdurahman Al Bassam, *Syarah Bulughur Maram ra*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada), h. 23

tidak memiliki modal. Dengan demikian adanya *mudharabah* ditunjukkan antara lain untuk memenuhi kebutuhan kedua golongan diatas, yakni untuk kemaslahatan manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan mereka.¹⁶

C. Macam –macam Bagi Hasil

1. *Musyarakah*

Musyarakah adalah akad kerja sama antara dua belah pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.¹⁷

Menurut PSAK No.106 paragraf 4, *Musyarakah* adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan sedangkan risiko berdasarkan kontribusi dana.

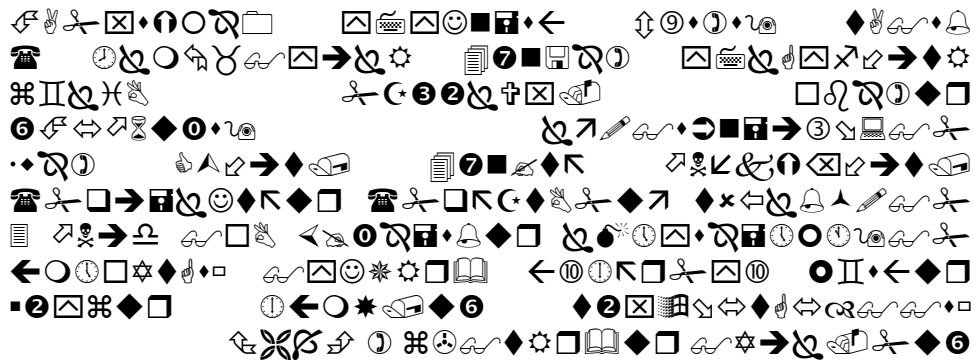
Musyarakah ada dua bentuk yaitu *Musyarakah* pemilik dan *Musyarakah* akad (kontrak). *Musyarakah* kepemilikan tercipta karena warisan, wasiat atau kondisi lainnya yang mengakibatkan pemilik satu asset oleh dua orang atau lebih. Dalam *musyarakah* ini, kepemilikan dua orang atau lebih berbagai dalam sebuah asset nyata berbagai pula dari keuntungan yang dihasilkan oleh usaha tertentu. Adapun *musyarakah* akad tercipta dengan cara kesepakatan dimana dua orang atau lebih setuju bahwa tiap orang dari

¹⁶ Syafii Jafri, *Fiqh Muamalah*, (Pekanbaru: Suska Press, 2008), h. 90

¹⁷ Safi,iAntonio, *Bank Syariah Bankir dan Praktisi Keuangan* (Jakarta :Tazkia Institut, 1999), h.143

mereka memberikan modal musyarakah dan mereka pun sepakar berbagai keuntungan dan mengatasi kerugiannya secara bersama-sama.¹⁸

Sebagaimana firman Allah SWT, QS Al-Sad ayat (38) : 24



Artinya : *"Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan Amat sedikitlah mereka ini". dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; Maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat.*¹⁹

Pada ayat diatas dapat ditarik kesimpulan dari ayat Al-Qur'an ini mendukung keberadaan prinsip dari pada musyarakah, dimana setiap partner dalam bisnis haruslah mempunyai akhlak yang baik pada saat melakukan usaha bisnisnya.

Musyarakah sebenarnya hampir sama dengan mudharabah karena musyarakah merupakan akad kerja sama di antara pemilik modal yang mencampurkan modal mereka dengan tujuan mencari keuntungan. Musyarakah adalah kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu

¹⁸ Ibid, h. 144

¹⁹ Departemen Agama RI, *Al-quran dan Terjemahan*, h. 454

Mudharabah berasal dari kata *dhara* artinya memukul atau

Modherabek adalah materi akhlak beragama, norma-norma, antara lain, keluh

Kemungkinan risiko secara mendalam dibahas menurut beberapa faktor

ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu tidak disebabkan oleh kelalaian pengelola.²¹

Berkaitan dengan bagi hasil , *mudharabah* dari segi penggunaannya terbagi menjadi dua: *mudharabah al-mutlaqah* , bentuk kerja sama antara *shahibul al maal* dengan *mudharib* yang cakupannya cukup luas dan tidak dibatasi dan *muqayyadah* adalah kebalikan daari *mudharabah mutlaqah* yang mana *mudharib* dibatasi oleh jenis usaha, waktu atau tempat usaha.²²

Hakikat dari *muamalah* dalam *mudharabah* itu adalah bahwa dari segi modal yang diserahkan itu ia adalah titipan yang mesti dijaga oleh pengusaha. Dari segi kerja, pengusaha berkedudukan sebagai wakil dari pemilik modal, maka berlaku padanya ketentuan tentang perwakilan, sedangkan dari segi keuntungan yang diperoleh, ia adalah harta serikat antara pemilik modal dan pengusaha. Adapun syarat-syarat *mudharabah* , antara lain²³:

- a. Modal harus dinyatakan dengan jelas mengenai jumlahnya.
- b. Modal harus diserahkan kepada *mudharib* untuk memungkinkannya melakukan usaha.
- c. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam persentase dari keuntungan yang mungkin dihasilkan nanti.
- d. Kesepakatan ratio persentase harus dicapai melalui negosiasi dan dituangkan dalam kontrak.

²¹ Muhammad, *Etika dan Strategi Bisnis*, (Yoqyakarta: CV.Andi Offset, 2008), h. 244

²² Ridwa Nurdin, *Akad-Akad Fiqh pada Perbankan Syariah diIndonesia*, (Banda Aceh: Tim Editor Pena, 2010), h. 75.

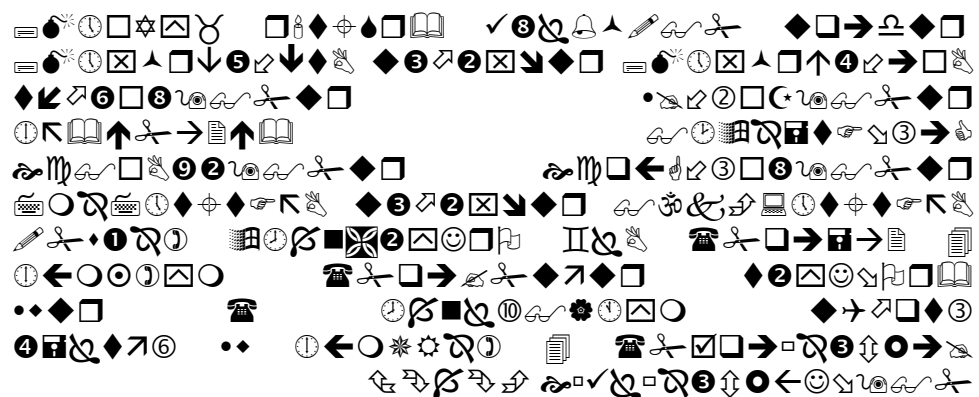
²³ Daeng Naja, *Akad Bank Syariah*, (Yoqyakarta: Tim Pustaka Yustisia, 2011), h. 52

- e. Pembagian keuntungan baru dapat dilakukan setelah *mudharib* mengembalikan seluruh (atau sebagian) modal kepada *shahib a-mal*.

3. *Muzara'ah*

“Menurut Hanafiah *muzara'ah* ialah akad untuk bercocok tanam dengan sebagian yang keluar dari bumi. Menurut al-Syafi'i berpendapat bahwa *muzara'ah* adalah seorang pekerja menyewa tanah dengan apa yang dihasilkan dari tanah tersebut. Dan menurut Syaikh Ibrahim al-Bajuri bahwa *muzara'ah* adalah pekerja mengelola tanah dengan sebagian apa yang dihasilkan darinya dan modal dari pemilik tanah.”²⁴

Muzara'ah berasal dari kata *zara'a* berarti menanam, menaburkan benih. Sebagaimana firman Allah, QS. Al-An'am(6) : 141,



²⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010) h. 153-155.

²⁵ Departemen Agama RI, *Al-quran dan Terjemahan*, h. 146

Pada ayat diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa Allah membolehkan hamba-Nya menikmati hasilnya dari berbagai macam pohon dan tanaman itu sebagai karunia daripada-Nya. Maka tidak ada hak sama sekali bagi hamba-Nya untuk mengharamkan apa yang telah dikaruniakan-Nya. Karena Dialah yang menciptakan, Dialah yang memberi, maka Dia pulalah yang berhak mengharamkan atau menghalalkan-Nya. Kalau ada di antara hamba-Nya yang mengharamkan-Nya maka dia telah menganggap dirinya sama dengan Allah dan orang-orang yang menaatinya mempersekutukan. Kemudian Allah memerintahkan untuk memberikan sebagian dari hasil tanaman di waktu selesai panen kepada fakir miskin, kaum kerabat dan anak yatim untuk mensyukuri nikmat

Jadi *muzara'ah* menurut bahasa berarti muamalah atas tanah dengan sebagian yang keluar sebagian darinya. Dan secara istilah *muzara'ah* berarti kerjasama antara pemilik lahan dengan petani penggarap dimana pemilik lahan memberikan tanah kepada petani untuk digarap agar dia mendapatkan bagian dari hasil tanamannya. Misalnya seperdua, sepertiga, lebih banyak atau lebih sedikit daripada itu.²⁶

Sehingga muzara'ah diartikan dengan kerjasama pengelolaan antara pemilik dengan penggarap dimana pemilik memberikan lahan pertaniannya kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu dari hasil panen. Menurut jamhur ulama ada empat rukun dalam *muzara'ah*.²⁷

a. Pemilik tanah

²⁶ Diakses pada 25 Maret 2014 dari <http://tehed-sambas.blogspot.com/2012/03/muzaraah-dalam-ekonomi-islam.html>

²⁷ Haroen Nasreon, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), h. 278

- b. Petani penggarap
- c. Objek *al-muzaraah*
- d. Ijab dan qabul secara lisan maupun tulisan

Hal yang berkaitan dengan alat-alat yang digunakan dalam bercocok tanam *muzara'ah*.²⁸ Menurut jumhur ulama (yang membolehkan akad *muzara'ah*) apabila akad telah memenuhi rukun dan syarat, maka akibat hukumnya adalah:

- a. Petani bertanggung jawab mengeluarkan biaya benih dan pemeliharaan pertanian tersebut
- b. Biaya pertanian seperti pupuk, biaya perairan, serta biaya pembersihan tanaman, ditanggung oleh petani dan pemilik lahan sesuai dengan persentase bagian masing-masing.
- c. Hasil panen dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama
- d. Pengairan dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan bersama dan apabila tidak ada kesepakatan, berlaku kebiasaan ditempat masing-masing.
- e. Apabila salah seorang meninggal dunia sebelum panen, maka akad tetap berlaku sampai panen dan yang meninggal diwakili oleh ahli warisnya. Lebih lanjut, akad itu dapat dipertimbangkan oleh ahli waris, apakah akan diteruskan atau tidak.

D. Rukun dan Syarat Bagi Hasil

1. Rukun *mudharabah*

Akad *mudharabah* memiliki beberapa rukun yang telah ditentukan guna mencapai keabsahaannya, yaitu pemilik (*shahibul mal*), pengelola

²⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah, Op Cit*, h 158-159.

(*Mudhaarib*), ucapan serah terima (*shighat ijab wa qabul*) modal (*ra'sul mal*), pekerjaan dan keuntungan. *Mudharabah* adalah akad kerja sama antara pemilik dan pengelola yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan dalam sebuah usaha perdagangan.²⁹ Menurut ulama Syafi'iyah, Syarat-syarat qiradh ada enam, yaitu:³⁰

- a. Pemilik barang yang menyerahkan barang – barang nya.
- b. Orang yang bekerja, yaitu mengelola barang yang diterima dari pemilik barang.
- c. Akad *mudharabah*, dilakukan oleh pemilik dan pengelola barang.
- d. *Mal*, yaitu harta pokok atau modal.
- e. *Amal*, yaitu pekerjaan pengelola harta sehingga menghasilkan laba.
- f. Keuntungan.

Jaminan kontrak *mudharabah* merujuk kepada tanggung jawab *mudharib* untuk mengembalikan modalnya kepada pemilik dalam semua keadaan . hal ini tidak dibolehkan karena adanya fakta bahwa pengangan *mudharib* akan dana itu sifatnya amanah, dan orang yang diamanahkan tidak berkewajiban menjamin dana itu kecuali melanggar batas atau menyalahi ketentuan.³¹

2. Syarat *mudharabah*.

Syarat – syarat *mudharabah* adalah :³²

²⁹ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Boqor: Ghalia Indonesia, 2012, Cet 1) 142

³⁰ Hendi Suhendi, *Op.Cit*, h. 139

³¹ Ismail Nawawi, *Op.Cit*, Hlm 143

³² Adiwarman Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), Ed 3- 4, h. 208 – 209

- a. Modal hendaknya uang legal, sedangkan menggunakan perhiasan, buah-buahan dan barang dagangan lainnya diperselisihkan ulama.
- b. Pengelohan tidak boleh dipersulit dengan melaksanakan jual beli, karena menyebabkan tidak tercapainya tujuan *mudharabah*, kadang – kadang pengusaha memperoleh kesempatan manis untuk memperoleh laba, akan tetapi ditanya oleh pemilik modal, akhirnya usahanya itu gagal dengan demikian gagal pula tujuan *mudharabah* yang sebenarnya memperoleh keuntungan.
- c. Lahan dibagi bersama antara pemilik dengan pengusaha, yang satu mendapatkan bagian laba dan jeri payahnya dan yang lain mengambil bagian laba dari modalnya.
- d. Pembagian laba hendaknya sudah ditentukan dalam akad.
- e. Akad tidak ditentukan berapa lama, karena laba itu tidak bisa diketahui kapan waktunya, seorang pengusaha kadang kadang belum ber laba hari ini akan tetapi mungkin akan memperoleh laba beberapa hari kemudian.

E. Hak dan kewajiban Pengelola.

Dalam pelaksanaan *mudharabah* mempunyai hak dan kewajiban sebagai pengelola (*Mudharib*) memiliki beberapa hak dalam akad *mudharabah* , yakni keuntungan yang disepakati dalam akad.

Pelaksanaan *mudharabah* apabila dikerjakan atau dilaksanakan sesuai dengan hukum, yang ditentukan dalam islam maka akan sangat membantu pihak-pihak yang kurang mampu, karena *mudharabah* ini kerjasama dengan upaya menyatuhkan potensi yang ada dengan tujuan saling menguntungkan.

Penyertaan modal dalam sebuah usaha melalui pendekatan sistem *mudharabah* merupakan hal yang sangat penting sebagai lang awal dari sebuah tinjauan kerja secara menyeluruh.

Menurut Abu Hanafiah dan Imam Malik, *mudharib* hanya berhak mendapatkan nafkah dari aset *mudharabah* ketika ia melakukan perjalanan dan baik biaya transportasi. Menurut Hanafiyah, Malikiyah dan Syafi'iyah, *Mudharib* berhak mendapatkan bagian atas hasil bisnis, tanpa harus dihitung dari keuntungan (*Revenue sharing*), akan tetapi mayoritas ulama sepakat, *Mudharib* harus mengembalikan pokok harta *shahibul mal*, dan ia tidak berhak mendapatkan bagian sebelumnya untuk menyerahkan modal *shahibul mal*. Jika masih terdapat keuntungan, akan dibagi sesuai dengan kesepakatan (*Profit Sharing*).³³

Adapun laba atau rugi yang diperoleh adalah untuk pemilik modal, karena pelaksanaan *mudharabah* tidak lain adalah buruh belaka, dia tidak perlu menanggung selain karena pelanggaran yang disengaja.

Mudharabah tidak jadi, apabila pelaksanaanya melakukan pelanggaran yang disengaja, atau tidak berhati – hati dalam menjaga harta, atau melakukan sesuatu yang bertentangan dengan tujuan akad. Dalam keadaan demikian *mudharabah* menjadi batal, dan pelaksana menanggung harta itu bila terjadi kerusakan, karena dialah penyebab kerusakan tersebut.³⁴

³³ *Ibid*, h. 145

³⁴ Syafii Jafri, *Op.Cit*, h. 95

